

## KUNJUNGAN KE SUMUT

# Jokowi Fokus Bangkitkan Nias

Presiden Joko Widodo (dua dari kanan) ditemani Gubsu Edy Rahmayadi (kanan) meninjau proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna'a di Nias Utara, Sumut, Rabu (06/07). (Foto: Humas Setkab)



**Nias, MIMBAR** - Presiden RI Joko Widodo meninjau perbaikan jalan di Kecamatan Alasa, Nias Utara, Rabu (6/7). Salah satu agenda kunjungan kerja ini adalah meninjau infrastruktur yang ada di Kepulauan Nias, terutama jalan dan jembatan.

Salah satu infrastruktur jalan yang ditinjau adalah peningkatan struktur ruas jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna'a sepanjang 16 km dengan

anggaran Rp32,36 miliar. Hanya saja, 65% (sekitar 171 Km) dari total panjang jalan di Kepulauan Nias (263.140 Km) dalam kategori rusak. Menurutnya Edy Rahmayadi ini berdampak signifikan pada pembangunan di Kepulauan Nias.

"Rata-rata tingkat kemiskinan di Kepulauan Nias yakni 18,89%, jauh di bawah Provinsi Sumut yang sebesar 9%. IPM juga masih rendah, berada di angka 63,90, Sumut sendiri sudah mencapai angka 71,74. Oleh karena itu, infrastruktur di sini sangat penting untuk membenahi ini," kata Edy Rahmayadi.

Pemprov Sumut sendiri menganggarkan Rp291,85 miliar untuk

■ Bersambung ke Hal 11



## PERTEMUAN DELEGASI PERDAGANGAN NEGARA-NEGARA G20 PUTARAN KEDUA DI SOLO :

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, memberikan sambutan saat menghadiri rapat pertemuan kedua "Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) Presidensi G20 di Solo, Jawa Tengah, Rabu (6/7). Pertemuan kedua TIIWG G20 membahas sejumlah isu diantaranya reformasi World Trade Organization (WTO) merespons perdagangan, investasi dan industri terhadap pandemi serta mendorong investasi berkelanjutan dalam rangka pemulihan ekonomi global. (Foto ANTARA)



## DRAF FINAL RKUHP:

# Presiden Harus Laporkan Sendiri

Jakarta, MIMBAR - Draf final RKUHP tetap mempertahankan pasal penghapusan kepada Presiden/Wakil Presiden dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Namun si presiden wajib melaporkan sendiri hal itu ke kepolisian.

■ Bersambung ke Hal 11

## PKS Gugat PT 20%

Jakarta, MIMBAR - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggugat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden PKS Ahmad Syaikhul mengatakan ada tiga alasan pihaknya mengajukan gugatan. "Untuk mendaftarkan secara

langsung permohonan, uji materi pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017, tentang pemilu terkait PT, dalam permohonan ini ada dua permohonan, yaitu permohonan pertama DPP PKS dan pemohon kedua Ketua Majelis Syuro PKS Dr Salim Segaf Aljufri," kata Syaikhul di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

■ Bersambung ke Hal 11



Presiden PKS Ahmad Syaikhul. (Foto cnni)

**Jadwal Salat**

7 DZULHIJAH 1443 H

Subuh : 04.59 WIB	Maghrib : 18.43 WIB
Zuhur : 12.33 WIB	Isha : 19.57 WIB
Ashar : 15.58 WIB	

■ Untuk kota Medan sekitarnya



## Hidayah

### Kualitas Pendidikan

Oleh Dr A Rasyid, MA

**KUALITAS** pendidikan ternyata sangat buruk, sebab berada pada posisi 27 tingkat nasional dari 34 Propinsi di tanah air. Gubsu harus serius memperhatikan perihal buruknya kualitas pendidikan di Sumut. Kualitas Pendidikan tentu saja merupakan persoalan sangat penting. Jika kualitasnya buruk maka dapat dibayangkan anak-anak Sumut adalah anak-anak yang tidak cerdas, jauh tertinggal dari propinsi lain. Anak yang tidak cerdas akan sulit bersaing dengan anak-anak yang memang tingkat kualitas pendidikannya cukup baik.

■ Bersambung ke Hal 11



## Hari Ini, RUU PAS Disahkan

Jakarta, MIMBAR - Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengambil keputusan tingkat satu atas hasil pembahasan RUU Lembaga Pemasarakatan (RUU PAS). Komisi III DPR dan Kemenkumham menyepakati RUU Pas untuk dibawa ke paripurna DPR RI yang bakal digelar besok (hari ini, red).

Kesepakatan tingkat I diambil saat rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022) sore. Rapat itu dipimpin oleh Wakil

Ketua Komisi III DPR Adies Kadir. Turut hadir secara fisik seluruh fraksi. Di kursi pimpinan komisi terlihat Adies Kadir dan Pangeran Khaerul Saleh.

Di kursi pemerintah, tampak hadir Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy beserta jajaran. Seluruh fraksi di DPR memberikan pandangan dan sikapnya terkait RUU Pas.

■ Bersambung ke Hal 11

## KISAH ISLAM DI CHERNIHIV

# Ukraina Minoritas Upayakan Masjid Sendiri

Medan, MIMBAR - Hingga saat ini, Ukraina masih membara akibat invasi Rusia sejak Kamis 24 Februari 2022. Di balik perang yang belum ada tanda-tanda berakhir tersebut, tercecce beberapa kisah menarik, salah satunya dari Kota Chernihiv, kota industri berpenduduk sekitar 300 ribu jiwa di utara ibukota Kiev.

Di kota inilah sembilan orang WNI asal Binjai, Sumatera Utara, sebagai migran, terjebak perang akibat gempuran rudal (peluru kendali) dan bom Rusia. Iskandar (46), warga Binjai, yang menjadi senior bagi delapan orang temannya -termasuk seorang diantaranya, anaknya sendiri-, harus berlindung di bunker bawah tanah selama 22 hari, siang dan malam,

■ Bersambung ke Hal 11



Usai menyelenggarakan sholat, biasanya sesama migran menyelenggarakan silaturahmi, diselang-selingi penyampaian ceramah. Imam Muhammad Amin, asal Ghana (pakai peci, tengah) sedang berbicara, dan Iskandar (pakaian hitam berpeci, kedua dari kanan) menjadi salah seorang pesertanya. Deretan jamaah di sebelah kiri, peserta dari negara lain. (Foto dok/kiriman iskandar-04)

## Poldasu Dalam Dana Nasabah Bank Sumut

Medan, MIMBAR - Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) tengah mendalami kasus uang nasabah Bank Sumut hilang mendadak dari tabungan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Sedang kita lidik kasus raibnya uang nasabah Bank Sumut senilai Rp2,7 miliar akibat skimming yang diduga dilakukan oleh warga asing," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (6/7).

■ Bersambung ke Hal 11

## UPDATE COVID-19

INDONESIA	SUMUT
<b>Positif</b>	<b>Positif</b>
6.095.351	155.200
<b>Sembuh</b>	<b>Sembuh</b>
5.922.117	151.877
<b>Meninggal</b>	<b>Meninggal</b>
156.758	3.259

Update Terakhir: 06-07-2022

Data Terakhir: 04-07-2022

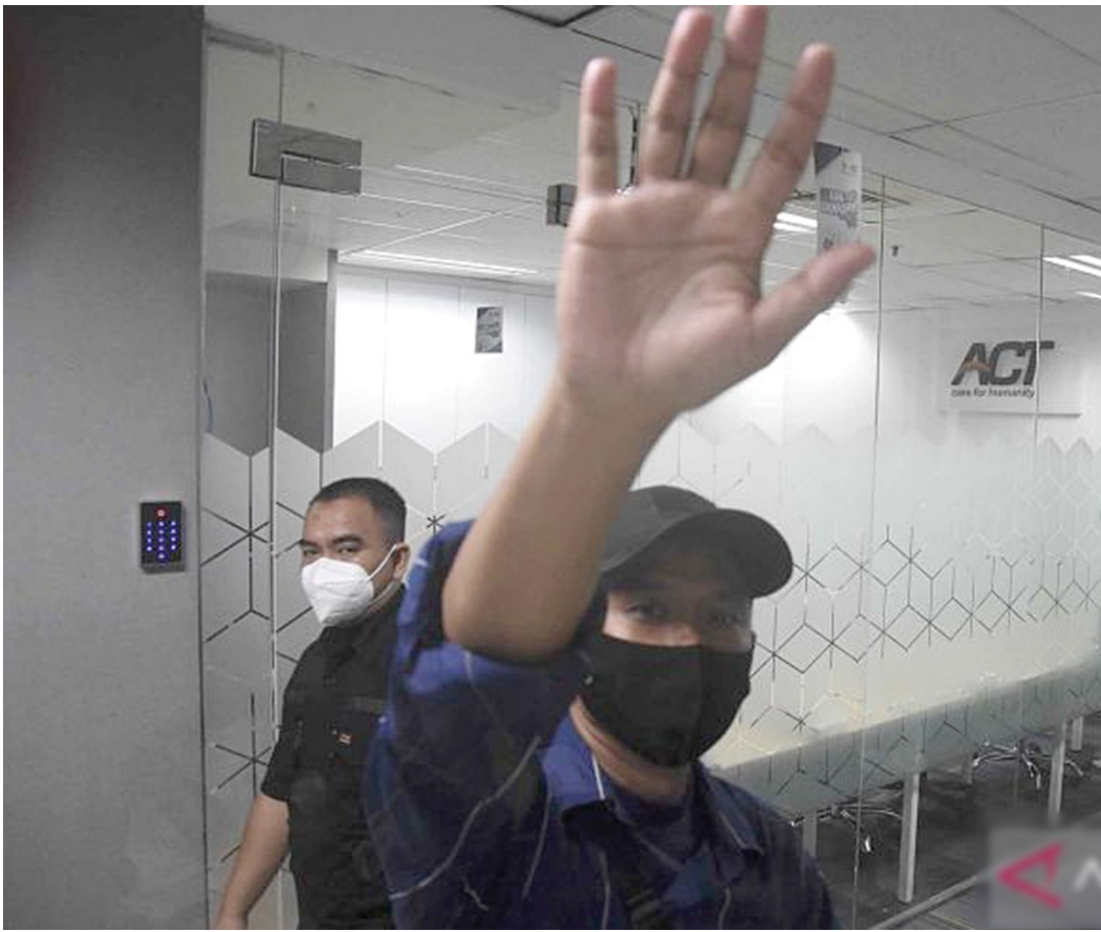
## Kasus Aktif 18.048

Jakarta, MIMBAR - Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 2.743 kasus, Rabu (6/7). Sementara itu jumlah pasien sembuh bertambah 2.045, meninggal 4 kasus. Jumlah kasus aktif 18.048 kasus, spesimen yang diperiksa 79.375, dan suspek yang diamati 5.712 kasus. Sebelumnya pada Selasa (5/7), tercatat total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 6.095.351, pasien sembuh 5.922.117, dan meninggal 156.758 orang. Hal ini dikarenakan tren kasus COVID-19 belakangan sudah mulai kembali melandai dan terkendali.

"Dalam satu minggu terakhir kami melihat terjadi tren pelandaian yang mengindikasikan wilayah aglomerasi Jabodetabek telah melewati puncak," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayah, Kementerian Dalam Negeri (Bina Adwil, Kemendagri) Safrizal, kepada wartawan, Rabu (6/7). (delh/js)



■ Borong cabe ni ya ...  
 ■ he..he..he..



**KEMENSOS CABUT IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG ACT :**  
Pegawai beraktivitas di kantor Aksi Cepat Tanggap (ACT), Menara 165, Jakarta, Rabu (6/7). Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Tahun 2022 terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. (Foto ANTARA)

## PKS Gugat...

Dari Halaman 1

Dia mengatakan PKS mengajukan gugatan karena ada aspirasi rakyat yang ingin adanya perubahan PT 20 persen. Dia menyebut PKS menjadi penyambung lidah rakyat.

"Ada beberapa alasan, kenapa PKS dan Dr Salim Syegaf mengajukan judicial review PT 20 persen. Pertama, kami PKS hadir di MK, sebagai penyambung lidah bagi rakyat yang menginginkan adanya perubahan aturan PT 20 persen. Keputusan tersebut diambil setelah kami bertemu dan mendengarkan aspirasi masyarakat untuk menolak aturan PT 20 persen," katanya.

Dia mengatakan gugatan ini diajukan untuk memperkuat sistem demokrasi sehingga dapat memperoleh peluang capres dan cawapres lebih dari dua pasang. Dia menilai hal itu penting untuk mengurai polarisasi di tengah masyarakat.

"Kedua kami ingin memperkuat sistem demokrasi, peluang lebih banyak capres dan cawapres, terbaik, pada masa-masa yang akan datang dan ketiga kami ingin mengurangi polarisasi di tengah masyarakat akibat hanya ada dua kandidat capres dan cawapres," katanya.

Syaikhu mengatakan, MK menyebut angka PT sebagai open legal policy pembentuk UU. Dia mengaku setuju dengan hal itu, namun menurutnya, harus dilengkapi dengan landasan yang sesuai. "MK menyebut bahwa angka PT ini sebagai open legal policy, pembentuk UU. PKS sepakat dengan argumentasi ini, namun open legal policy ini seharusnya disertakan dengan landasan, rasional, proporsional agar tidak bertentangan dengan UUD RI 1945," katanya.

Dia mengatakan, PKS telah mencermati keputusan MK nomor, 74/PUU-XVIII/2020 yang menurutnya menyatakan parpol atau gabungan

parpol peserta pemilu memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017. Atas dasar itu, dia meminta angka PT turun menjadi 7-9 persen.

"Berdasarkan kajian tim hukum kami, sampai saat ini tidak ada kajian ilmiah terkait besaran angka PT 20 persen, adapun angka yang rasional dan proporsional berdasarkan kajian tim hukum kami, adalah pada interval 7 persen sampai 9 persen kursi DPR," katanya.

Syaikhu berharap MK dapat mengabulkan permohonannya. Hal itu agar masyarakat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik. "Semoga permohonan judicial review dapat dikabulkan agar rakyat Indonesia dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden terbaik yang mampu membawa Indonesia adil dan sejahtera sesuai cita-cita para pendiri bangsa," tuturnya. (det/mc)

## Jokowi Fokus...

Dari Halaman 1

perbaikan jalan sekitar 55,8 Km di Kepulauan Nias. Perbaikan ini masuk ke dalam program pembangunan jalan dan jembatan Pemprov Sumut 2022-2024 sepanjang 450 Km dengan skema multi years.

Ada tujuh ruas jalan nasional di Kepulauan Nias dengan panjang 165,75 Km sedangkan jalan provinsi ada 16 ruas dengan panjang 263,14 Km. Edy Rahmayadi berharap, dengan kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah permasalahan infrastruktur jalan ini bisa teratasi.

"Perbaikan jalan ini sedang berlangsung, Nias Barat 18,70 Km, Nias Utara 27,7 Km, Nias Selatan 5,9 Km, Nias 2,5 Km dan Gunungsitoli 1 Km. Tentu kita berharap dengan pembangunan infrastruktur baik dari Pemerintah Pusat, Pemprov Sumut dan Pemda di sini pembangunan di Kepulauan Nias masalah infrastruktur lebih cepat kita atasi," kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo menargetkan proyek peningkatan struktur jalan Laehuwa-Ombolata-Tumula-Faekhuna'a rampung tahun depan. Sedangkan untuk poros jalan provinsi dan kabupaten/kota Jokowi minta gubernur dan bupati/walikota segera menanganinya.

"Kemudian yang jalan provinsi mestinya segera ditangani oleh Pak Gubernur. Terus kabupaten, yang tadi saya tanya ke Pak Bupati, karena memang kemampuan APBD-nya tidak memungkinkan, ya nanti akan diurus Kementerian PU," kata Jokowi.

Edy Rahmayadi dan Joko Widodo tiba di Bandar Udara Binaka pukul 08.00 WIB dan langsung bergerak ke Nias Utara melalui jalan darat.

Terlihat juga dalam rombongan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak.

### TEKAN ANGKA KEMISKINAN

Usai meninjau pembangunan infrastruktur di Nias Utara, Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi juga meninjau pembangunan Jalan Lingkar Nias Barat dan Jembatan Idano Sibolou di Nias Barat, Rabu (6/7). Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan, khususnya di Nias Barat.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut, Brawijaya, yang turut serta dalam peninjauan tersebut menyampaikan, akan menanangi jalan sepanjang 24 km. Jalan tersebut merupakan bagian dari Jalan Lingkar Nias yang menghubungkan kota dan kabupaten di Pulau Nias. Juga telah terbangun jembatan sepanjang 50 meter di Nias Barat. "Selain itu, kita juga akan melakukan penanganian dari Kota Gunungsitoli menuju ke Nias Barat, Lahomi menuju ke Sirombu," kata Brawijaya.

Pembangunan infrastruktur konektivitas di Pulau Nias sendiri, selain bertujuan untuk membuka keterisolasian wilayah barat dan utara Nias, juga untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Untuk diketahui, sejumlah kabupaten di Pulau Nias ditetapkan sebagai daerah tertinggal sesuai Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 dan juga tergolong daerah dengan kemiskinan ekstrem.

Untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah kemudian menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022

tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu upaya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mendukung hal tersebut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengapresiasi pemerintah pusat yang menggelontorkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias. Menurutnya, dengan infrastruktur tersebut roda perekonomian akan meningkat. Dengan begitu, masyarakat diharapkan akan sejahtera.

Edy juga menyoroti angka kemiskinan Kepulauan Nias yang perlu ditekan. Angka kemiskinan di Nias Barat saja berada pada angka 26%. Sementara rata-rata angka kemiskinan Sumut berada pada angka 9%.

Di Nias Barat, Edy akan melakukan peningkatan infrastruktur sepanjang 7,4 km, pembukaan jalan 11,3 km, dan akan membangun jembatan sepanjang 110 meter. "Inilah kita bangun jalan, jembatan, kita mau rakyat enak jalan, enak distribusi barang, sehingga sejahtera masyarakat, dan kemiskinan berkurang," kata Edy, usai peninjauan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Bupati Nias Barat Khenoki Waruwu.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu. (A-05)

## Ukraina Minoritas...

Dari Halaman 1

sebelum kemudian datang bantuan penyelamatan dari Kedubes Indonesia di Kiev -kota yang masih aman.

Melalui jalan tak mudah, mereka dievakuasi pada Kamis 17 Maret 2022 pagi. Mereka meneros jalan yang penuh risiko kena gempur rudal atau bom, menuju ibukota Kiev, kemudian lanjut ke kota Lviv di barat laut Kiev, sebelum berhasil melintasi perbatasan Polandia yang aman.

Lebih dari 24 jam mereka menempuh perjalanan berisiko itu secara nonstop, hingga tiba di Polandia pada pukul 11.00 siang, waktu setempat, Jumat 18 Maret.

Dari perbatasan Polandia, mereka langsung menuju kota Warsawa, ibukota Polandia, dan seterusnya terbang ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian ke Bandara Kualanamu, Deliserdang. Seterusnya kembali ke kota Binjai, berkumpul kembali dengan keluarga yang sudah tiga pekan harap-harap cemas atas keselamatan mereka.

**SHOLAT JUMAT DENGAN 20 JAMA'AH**  
Banyak hal menarik dalam perbincangan Koran Mimbar Umum dengan Iskandar, Selasa pukul 5.30 petang, kemarin, yang bermanfaat untuk diketahui publik.

Salah satu yang menarik ialah, keberadaan sedikit warga Muslim asal berbagai negara yang bekerja di industri Ukraina. Mereka antara lain

dari Azerbaijan, Ghana, Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Indonesia sendiri. Mereka bekerja di kota Chernihiv, kota industri yang cukup makmur, menjadi tujuan pencari kerja berbagai negara.

Iskandar dan kawan-kawan, merasakan sendiri -atau lebih tepat: menikmati- persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi Besar Muhammad SAW, bahwa sesama Muslim, adalah bersaudara, dan bahkan persaudaraan atas ikatan se-aqidah, terasa lebih karib dan nikmat dibanding saudara sedarah tetapi berbeda agama, terutama pada saat berada di perantaraan.

Sebagai warga minoritas, dan hampir semuanya pendatang, mereka urun-urutan -disokong baitul maal masjid utama di ibukota Kiev- menyewa sebuah rumah, untuk dijadikan masjid. Tentu, rumah sewaan milik warga Ukraina -mayoritas beragama Kristen Orthodox yang tergolong welcome terhadap Muslim- itu, tidak bisa sesuka hati didesain menurut keinginan penyewa. Mereka hanya dapat memakainya sebagai tempat sholat, dan pada setiap Jumat menyelenggarakan sholat Jumat. Imam utama mereka adalah Muhammad Amin dari Ghana.

Meski jumlah mereka sebenarnya tidak cukup 40 orang -menurut syariat sunni, Sholat Jumat baru wajib bila jama'ah minimal berjumlah 40 orang- namun mereka tetap mendirikan Sholat Jumat, agar sekaligus menjadi ajang silaturahmi antarmuslim antarnegara, yang ternyata bisa berlangsung dan sangat akrab.

Ada dua bahasa pengantar dalam pergaulan, secara campur-baur, yakni bahasa Rusia dan Inggris. Bangsa Ukraina, dan juga migran dari berbagai negara, umumnya dapat bertutur dengan dua bahasa tersebut.

### BUNKER

Bunker, umumnya dipahami sebagai ruang bawah tanah. Tetapi pemahamannya adalah tempat perlindungan saat terjadi bahaya. Hanya, kata Iskandar, sejak dulu, hampir semua bangunan umum -dan bahkan setiap rumah kediaman warga- di Ukraina, menyediakan basement atau underground.

Jadi, dalam kondisi ada bahaya seperti perang yang sekarang terjadi, masing-masing keluarga dapat berlindung di basement rumah mereka sebagai bunker.

Tidak ada penjelasan mengenai mengapa sebagian besar bangunan memiliki basement, tetapi dengan konstruksi bangunan semacam itu, maka dalam pemandangan keseharian saat situasi aman, tidak ada kendaraan yang terparkir tak beraturan atau semrawut di jalan-jalan. Semua tertib. Ukraina, menunjukkan dirinya bangsa teratur, maju, dan beradab.

Iskandar mengatakan, Ukraina sangat kaya hasil pertanian, terutama gandum. Dan, itulah yang menjadi salah satu alasan Rusia ingin menginvasinya, yang isyaallah diceritakan pada penerbitan berikutnya. (A-04)

## Presiden Harus...

Dari Halaman 1

"Setiap orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

RKUHP menegaskan perbuatan yang dimaksud di Pasal 218 ayat 1 bukar delik pidana bila dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Hukuman diperberat menjadi 4 tahun penjara bila perbuatan di atas dilakukan lewat ITE. Pasal 219 selengkapnya berbunyi:

Setiap Orang yang menyebarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara

paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Lalu, apakah bisa aparat langsung menindak? Tidak. Sebab delik ini adalah delik aduan sehingga presiden wajib melaporkan sendiri. Berikut ini bunyi Pasal 220:

(1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.

### KUMPUL KEBO

### DITAHAN 6 BULAN

Draft terbaru Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih mengatur ancaman pidana terhadap perzinahan dan kohabitasi atau kumpul kebo. Pasal 415 RKUHP mencantumkan sanksi pidana satu tahun bagi orang yang berzina. Orang tersebut juga terancam denda.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi

Pasal 415 RKUHP draf tanggal 4 Juli 2022, dikutip Rabu (6/7).

Pasal berikutnya mengatur larangan kohabitasi atau kumpul kebo. RKUHP mengancam pelaku perbuatan itu dengan hukuman penjara dan denda.

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 416 RKUHP.

RKUHP membatasi orang yang bisa melaporkan tindak pidana zina dan kohabitasi. Orang yang telah menikah hanya bisa dilaporkan oleh suami atau istrinya. Bagi orang yang belum menikah, hanya orang tua atau anak yang bisa melaporkan.

Pemerintah telah resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-undang Pemyarakatan (RUU PAS) dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ke DPR.

Penyerahan itu dilakukan oleh Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddy Hiariej ke Komisi III DPR RI dalam rapat kerja yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7). (det/cnni/js)

## Poldasu Dalam...

Dari Halaman 1

"Penyidik sudah menerima laporan dari Bank Sumut dan sedang mendalami," ujar Juru Bicara Polda Sumut tersebut.

Hadri menambahkan, saat ini pihak Bank Sumut sedang memberikan keterangan terkait hilangnya uang nasabah sebesar Rp 2,7 miliar tersebut.

Sebelumnya, sejumlah nasabah mendatangi Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol mengadukan masalah dana yang tiba-tiba raib dari tabungan, Senin (4/7).

Akibatnya, nasabah lain yang dananya belum raib, ramai-ramai menarik dananya dari Bank Sumut. "Sementara kami tarik dulu karena takut nanti raib pula," kata Ali salah seorang nasabah.

Sementara seorang nasabah lainnya mengakui masalahnya karena uang senilai Rp50 juta terdedit dari rekeningnya. "Ada notifikasi masuk ke HP kalau dana saya di Bank Sumut keluar pada malam hari. Padahal saat itu, saya tak ada menarik dana," akunya.

Sekretaris Perusahaan Bank Sumut, Ismanto, ketika dikonfirmasi menyatakan benar ada sejumlah nasabah yang mengadu. Nasabah bilang menerima notifikasi penarikan dana pada malam hari dan subuh.

Ismanto mengungkapkan, Bank Sumut juga menerima pengaduan nasabah yang merasa hilang uangnya di tabungan.

Menurutnya, ada nasabah yang merasa tidak ada menarik uangnya tapi notifikasi pemberitahuan penarikan uang masuk ke HP mereka. Penarikan dana diketahui ditarik oleh semacam hacker dari mesin ATM di luar Sumut.

"Saat ini kita lagi investigasi semua nasabah yang merasa kehilangan dana," terangnya Bank Sumut bertanggungjawab atas kehilangan dana nasabah tersebut. "Bank Sumut sedang mendata nasabah mana saja dan di cabang mana yang mengalami kasus seperti ini," pungkasnya. (js)

## Hari Ini...

Dari Halaman 1

Mayoritas fraksi di DPR menyatakan setuju RUU Pas dibawa ke paripurna DPR.

"Selanjutnya kami meminta persetujuan kepada Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Pemyarakatan dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, yaitu tanggal 7 Juli 2022. Apakah dapat disetujui?" tanya Adies Kadir selaku pimpinan sidang.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Keputusan ini menandakan bahwa RUU PAS akan dibawa ke paripurna DPR RI untuk disahkan. Sebagai informasi, rapat paripurna penutupan masa sidang tersebut digelar hari ini, Kamis (7/7).

Eddy kemudian menyampaikan pandangan pemerintah usai pengambilan keputusan RUU Pas untuk dibawa ke rapat paripurna besok. Eddy berharap RUU Pas dapat disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna.

"Sebagaimana telah kita dengarkan bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua, guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Eddy. (det/js)



## Kualitas Pendidikan

Dari Halaman 1

Seharusnya ada gagasan besar yang akan dilakukan Gubsu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut, tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Kepala Sekolah saja.

Prihal buruknya kualitas pendidikan di Sumut, terungkap ketika Gubsu melantik 334 Kepala Sekolah SMA dan SMK dan SLB Negeri di Sumut pada Selasa lalu. Saat itu Gubsu menekankan kepada Kepala Sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut.

Kita yakin Kepala Sekolah tidak akan mampu berbuat banyak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut. Yang kita harapkan Gubsu serius memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut.

Jika Sumut kehilangan arah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sebaiknya melakukan studi banding ke provinsi lain yang sudah cukup maju kualitas pendidikannya, jika perlu melakukan studi banding ke negara yang memiliki kualitas pendidikan yang cukup maju.

Sekali lagi kita tekankan persoalan kualitas pendidikan tidak bisa diabaikan begitu saja. Ini adalah persoalan besar yang harus mendapat perhatian serius baik Gubsu maupun fraksi di DPRD Sumut yang membidangi pendidikan. (\*)